

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Penerapan tata kelola teknologi informasi dan komunikasi (TIK) saat ini sudah menjadi kebutuhan dan tuntutan pada setiap instansi penyelenggara pelayanan publik. Peran TIK semakin penting bagi upaya peningkatan kualitas layanan sebagai salah satu realisasi dari tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance Corporate*). Dalam mencapai *Good Governance* untuk menjalankan sistem pemerintahan yang lebih efisien banyak pemerintah yang sudah menerapkan *E-Government*. Dengan adanya *E-Government* maka tata kelola TI pada semua faktor dan dimensi yang berhubungan dengan penggunaan teknologi informasi menjadi bersinergi dan bisa memberikan nilai tambah yang diharapkan bagi institusi.

Diskominfo kabupaten Bandung sebagai instansi pemerintah telah menggunakan dan memanfaatkan teknologi informasi dalam kegiatan operasional aktifitasnya. Dengan mengacu pada peraturan bupati Bandung No.17 tahun 2016 mengenai tata kelola infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi pemerintahan kabupaten Bandung bahwa infrastruktur TIK adalah sumber daya teknologi yang diperlukan untuk menjamin sistem informasi dapat berjalan dengan baik dalam pelaksanaan *E-Government*[3]. Saat ini diskominfo memiliki sistem informasi yang dijalankan untuk menunjang kegiatan di pemerintahan kabupaten Bandung. Sesuai dengan misi dari diskominfo kabupaten Bandung bahwa diskominfo ingin mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, namun hambatan yang ditemui berdasarkan renja diskominfo tahun 2019 belum memadainya regulasi/tata kelola pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) sehingga belum bisa diimplementasikan walaupun sudah adanya Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Tata Kelola Infrastruktur Teknologi Informasi Dan Komunikasi Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bandung tetapi sumber daya aparaturnya belum sepenuhnya memahami dari isi peraturan tersebut, selain itu adanya masalah infrastruktur yaitu jaringan, server dan internet masih sering terjadi gangguan. SOP yang ada juga belum berjalan secara optimal karena sumber daya aparaturnya belum linear sesuai kompetensinya. Maka sangat penting dilakukan evaluasi tata kelola terutama pada Diskominfo kabupaten Bandung sebagai penyedia layanan informasi publik.

Berdasarkan pengambilan data dalam proses *Focus Group Discussion* (FGD) didapatkan bahwa diskominfo kabupaten Bandung menyepakati bahwa domain yang digunakan adalah *Delivery, Service, and Support* (DSS). Domain *Delivery, Service, and Support* (DSS) berkaitan dengan pengiriman aktual dan dukungan dari layanan yang dibutuhkan, yang meliputi pelayanan, pengelolaan keamanan dan kelangsungan, dukungan layanan bagi pengguna, dan manajemen data dan fasilitas operasional. Target *capability level* yang diharapkan yaitu pada level 2.

1.2 Tujuan

Berdasarkan latar belakang yang sudah dibuat maka tujuan yang ingin dicapai adalah :

1. Mengetahui berapa *capability level* tata kelola teknologi informasi pada Diskominfo Kabupaten Bandung dengan berfokus menganalisis gap.
2. Hasil gap tersebut kemudian dapat menghasilkan susunan rekomendasi yang diberikan kepada diskominfo agar dapat mencapai *capability level* yang sudah ditargetkan.

Batasan masalah dari penelitian ini adalah audit hanya terfokus pada tata kelola teknologi informasi pada Diskominfo Kabupaten Bandung dengan menggunakan COBIT 5 dengan domain terpilih DSS01 dan DSS05.